

PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh : Suratmin

Mengenai pembentukan KNID Yogyakarta berawal dengan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidato itu intinya memerintahkan kepada rakyat di daerah-daerah untuk membentuk KNI, PNI, dan BKR, tetapi akhirnya pembentukan PNI ditentang oleh Ayahir dan kawan-kawannya dengan persetujuan Hatta. Maka, yang diusahakan oleh rakyat dan pemerintah di daerah adalah KNI dan BKR.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta diprakarsai oleh kelompok nasionalis tua yang memiliki hubungan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis di Jakarta yang di antaranya adalah Moh. Asrar. Bersama-sama dengan Marlan, Moh. Asrar mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh *Kooti Hokokai* dan tokoh-tokoh lain di Ngabean, Yogyakarta (bekas kantor penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta) dipimpin oleh R.M. Sosrosudirdjo.

Di dalam rapat itu terjadi perbedaan pendapat di antara kelompok bawah tanah dengan kelompok *Hokokai*, yaitu Wiwoho dan Sudarisman Purwokusumo dengan bicaranya keras. Asrar yang termasuk kelompok bawah tanah sudah dipesan oleh Sartono supaya tidak boleh bertentangan dengan Sultan karena pada saat itu Sultan sebagai ketua *Kooti Hokokai*. Akhirnya, perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan oleh Sultan. Pada waktu itu Sultan masih menjadi *Yogyakarta Kooti Hokokai*. Dengan demikian tidaklah sulit baginya untuk mengarahkan kedua kelompok tersebut dan terbentuklah KNID Yogyakarta yang semula beranggotakan 32 orang. Jumlah anggota itu meningkat dengan pesat tatkala berbahai kebutuhan praktis revolusi menghendaki masuknya lebih banyak kelompok masyarakat, sehingga akhirnya menjadi 84 orang termasuk 3 orang penasehatnya.

Adapun daftar nama-nama anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta yang tersusun awal September 1945 adalah sebagai berikut :

Penasehat :

1. B.P.H. Purboyo.
2. Ki Bagus Hadikusumo.
3. Dr. Sukiman.

Anggota-anggota :

1. Moh. Saleh.
2. K.R.T. Hardjodiningrat.
3. Mr. Tandiono Manu.
4. K.R.T. Josodiningrat.
5. Wiwoho.
6. B.R.M. Sukadari.
7. Marlan.
8. Mr. S. Purwokusumo.
9. H. Farid Ma'ruf.
10. Siswoharsojo.

11. D.D. Susanto.
12. R. Atmodarminto.
13. Adisumarto.
14. Wardoyo.
15. Asrar.
16. Saebani.
17. S. Parman.
18. Mochtar.
19. Hertog.
20. R.M. Sosrodirdjo.
21. B.P.H. Suryodiningrat.
22. Sudarsono (*Keisi*).
23. Sudarto.
24. Sukiman.
25. Oemar Slamet.
26. Mawardi.
27. Reksosiswo.
28. R.H. Hadjid.
29. K.P.H. Nototaruno.
30. Ramelah.
31. R. Iskandar.
32. Tehaya.
33. Mr. K.R.T. Brotokusumo.
34. R. Mawal.
35. Hardjosubroto.
36. R.M. Sumarmadi.
37. K.R.T. Notoyudo.
38. Wijono.
39. Nj. Sutomo.
40. Nj. Sutanto.
41. Ismullah.
42. K.R.T. Honggowongso.
43. Soetomo (PETA).
44. Moedjodo.
45. Sudarsono.
46. Sismadi.
47. Mr. Wijono.
48. R.M. Gondojuwono.
49. Hadisumarto.
50. M.R. Kasmat.
51. P.B.H. Hadinegoro.
52. Bedjo.
53. Adham Basjari.
54. R.L. Himodigdojo.
55. Zarkasi.
56. M. Latjuba.
57. Moh. Tauchid.
58. Dr. Sumardi.
59. K.R.T. Martohusodo.
60. Ngatidjo.
61. Sumantoro.
62. Mr. Sorjotjokro.
63. Lagiono.
64. Djajengkarso.
65. R. Rudjito.
66. H. Abdul Hamid.
67. Ir. K.R.T. Dipokusumo.
68. R.L. Sastroseputro.
69. Ki Sudarminto.
70. R. Sugardo.
71. R. Darmosugito.
72. Wali alfatah.
73. Suhamir.
74. Wignjosuwarno.
75. Soetomo (Antara).
76. K.R.M.T. Suryoningrat.
77. Djaludi Nasution.
78. Oemar Djoy.
79. Dr. Sutjipto.
80. Sardjono.
81. Mr. Sjamsudin.
82. Sudiro.
83. (?)

Berdasarkan golongan atau organisasinya, anggota KNID Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kelompok *Kooti Hokokai* berjumlah 16 orang.
2. Kelompok anggota pemilik sebelum zaman Jepang berjumlah 16 orang.

Mungkin mereka itulah yang pertama kali bekerja sebagai anggota KNID Yogyakarta. Setelah berkembang menjadi 84 orang anggota pengurusnya dan 3 orang penasehatnya, maka dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Kelompok *Kooti Hokokai* berjumlah 16 orang (18,3%). Dalam *Kooti Hokokai* mereka di bawah pimpinan Sultan sebagai *Keityoo*, dan kebanyakan mereka menjadi abdi dalem Kepatihan yang ada di bawah perintah Sultan.
2. Kelompok Perkumpulan Kawulo Ngayogyakarta (PKN) berjumlah 7 orang (8,04%) di bawah pimpinan B.P.H. Suryodiningrat yang memiliki hubungan keluarga dengan Sultan.
3. Kelompok Polisi, mantan PETA dan mantan *Heiho* berjumlah 10 orang (11,4%). Polisi merupakan kekuatan bersenjata pada waktu proklamasi kemerdekaan.
4. Kelompok Taman Siswa berjumlah 3 orang (3,44%) berada di bawah pengaruh Ki Hadjar Dewantara sebagai golongan nasionalis yang gigih. Mereka berjuang melalui bermacam-macam saluran. Kelompok ini berhubungan baik dengan Sultan, sebab Ki Hadjar Dewantara sebagai tokoh Taman Siswa akrab dengan Sultan.
5. Kelompok Islam berjumlah 12 orang (13,79%). Mereka terdiri atas tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan mengadakan kunjungan ke lembaga-lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah dan mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh KEI sejak zaman Jepang.
6. Kelompok wartawan yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan nasionalisme berjumlah 5 orang (5,74%). Mereka merasa mendapatkan angin baru dari kraton karena waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX naik tahta, mereka mendapatkan undangan kehormatan seperti halnya orang-orang Belanda. Hal ini belum pernah dialaminya, sehingga mereka merasa lebih dekat dengan Sultan.
7. Kelompok politik berjumlah 16 orang (18,395%). Mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan pada zaman Belanda yang pada zaman Jepang tidak dapat melanjutkan gerakan politiknya, tetapi dengan segala cara mereka selalu menjalin hubungan yang baik dengan kawan-kawannya di Yogyakarta maupun yang tinggal di luar Yogyakarta. Kalau situasi memungkinkan mereka menghubungi mantan-mantan pemimpinnya yang ada di Jakarta.
8. Kelompok Promotor Pemuda Nasional berjumlah 2 orang (2,29%).
9. Kelompok BPU berjumlah 1 orang (1,14%).
10. Kelompok Angkatan Muda Pathook berjumlah 1 orang (1,14%) dan masih ada 12 anggota-anggota yang belum jelas kelompoknya.

Kelompok 8, 9, dan 10 itu pada zaman Jepang berjuang di bawah tanah, tetapi pada waktu proklamasi kemerdekaan diumumkan, mereka menjadi penggerak rakyat secara langsung. Sesuai dengan sifatnya gerakan di bawah tanah, mereka tidak memiliki organisasi formal yang teratur, tetapi lebih merupakan paguyuban atau kerukunan yang dihubungkan oleh ikatan batin dan cita-cita kemerdekaan. Mereka biasanya bergabung dengan kesatuan-kesatuan kecil sesuai dengan gagasan partai kader. Anggota kesatuan kecil itu masing-masing membentuk kesatuan kecil baru yang tidak saling mengenal. Dengan demikian cita-cita mereka tersebar luas tanpa diketahui pusatnya. Jadi, meskipun mereka tidak memiliki

organisasi resmi yang kuat, tetapi mereka mampu menggerakkan rakyat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Meskipun anggota kelompok bawah tanah itu kebanyakan pemuda pelajar maupun PETA, *Heiho*, dan *Kempetai* yang relatif masih muda, tetapi mereka memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh di Yogyakarta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hampir semua pemimpin kelompok masyarakat yang menjadi anggota KNID Yogyakarta memiliki hubungan dengan Sultan lewat jalur birokrasi, politik, dan sosial. Ketua KNID semula dipilih secara demokratis, tetapi kemudian ada instruksi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Kasman Singodimejo (mantan *Daidantyo*) agar ketua KNID diambil dari orang-orang *Daidantyo*, tetapi yang dianggap memenuhi syarat Muhammad Saleh, *Daidantyo* dari Bantul. Maka, dia yang baru pulang dari Madura ditelegram untuk memangku jabatan sebagai ketua KNID Yogyakarta.

Selain dibentuk KNID di Yogyakarta pada 1 september 1945 juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari kegiatan Badan Penolong Korban-Korban Perang (BPKKP). BKR Yogyakarta beranggotakan mantan PETA, *Heiho*, *Seinendan*, *Keibodan*, Barisan Berani Mati, Hizbullah, Sabilillah, Barisan Pelopor, Tentara Rakyat Mataram, dan sebagainya. Tugasnya menjamin ketenteraman dan keamanan rakyat. Tokoh-tokoh BKR itu adalah Umar Slamet, S. Parman, Sukardi, Oemar Joy, dan Sudarsono. BKR dipelopori oleh BPU, sedangkan pimpinan BPU sendiri adalah Umar Slamet, S. Parman, dan Sudharto. BPU adalah gabungan badan-badan pemuda yang pada bulan Agustus diundang oleh Sultan untuk mengadakan pertemuan kilat guna membentuk gabungan pemuda yang oleh Sultan disertai tugas menjaga keamanan. Dengan demikian dapat dikatakan hubungan Sultan dan BKR sangat dekat.

Yang menjadi dasar hukum terbentuknya KNID Yogyakarta adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Perintah Presiden RI dalam pidato radio pada tanggal 23 Agustus 1945 mengenai harus diadakannya Komite Nasional Indonesia Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tanggal 23 Nopember 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.

Sumber : Suratmin, *Menguak Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Peranan Komite Nasional Indonesia Daerah Tahun 1945-1950)*, Masyarakat Sejarawan Indonesia : 2000.